

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI OLEH
PRESIDEN KEPADA PELAKU PEMBERONTAKAN GERAKAN ACEH MERDEKA**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Kepada Jurusan Jinayah Siyasah**



Disusun oleh:

VESTIN MUHARDIKA

1313040518

JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

IMAM BONJOL PADANG

1439 H / 2018 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Amnesti Oleh Presiden Kepada Pelaku Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka*" telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 14 Februari 2018

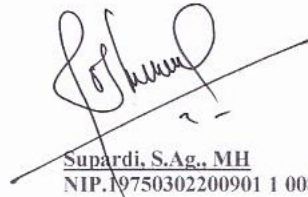
Disetujui oleh,

Pembimbing I



Nelmawarni, M.Hum., Ph.D
NIP. 19710615199703 2 001

Pembimbing II



Supardi, S.Ag., MH
NIP. 19750302200901 1 008

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Amnesti oleh Presiden Kepada Pelaku Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka**. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pemberian amnesti oleh presiden kepada kelompok gerakan Aceh merdeka pada tahun 2005. Amnesti adalah tindakan pengampunan yang diberikan oleh pemerintah dengan mengembalikan status tidak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya baik yang telah dijatuhi pidana maupun yang belum dijatuhi pidana oleh hakim, baik yang sudah dituntut atau belum dituntut oleh penuntut umum, baik yang sudah disidik maupun yang belum disidik oleh penyidik dan baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh kekuasaan yang sah. Di dalam hukum Islam pemberontakan merupakan perkara hudud, di mana tidak ada pengampunan baginya apabila telah sampai kepada penguasa. Hukuman bagi pemberontakan adalah hukuman mati atau diperangi. Sehubungan dengan hal itu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apa alasan presiden memberikan amnesti kepada para pelaku pemberontakan gerakan Aceh merdeka dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian amnesti tersebut.

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*) dalam arti penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta menganalisis bahan penelitian. Dalam mengelola data, penulis telah menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data penulisan ini adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian penulis berkesimpulan bahwa alasan dan pertimbangan presiden dalam memberikan amnesti kepada para pelaku pemberontakan gerakan Aceh merdeka adalah dengan mempertimbangkan kemashlahatan untuk bangsa dan negara khususnya untuk rakyat Aceh sendiri dengan memberi amnesti berarti memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri dalam bentuk keinsyafan, dalam bentuk kembali dari kesalahan yang telah dilakukan sehingga dapat diterima kembali di tengah masyarakat dan mencegah agar wilayah-wilayah lain di Indonesia tidak memiliki niat untuk memisahkan diri dari NKRI. Dalam hukum Islam, amnesti dapat disebut syafaat. Pemberontakan GAM dapat diberi syafaat apabila mereka bertaubat. Presiden melihat adanya kepentingan negara yang jauh lebih besar, daripada terus menerus melakukan peperangan yang dapat menghabiskan kekayaan negara dan menimbulkan korban jiwa.